



**Official Statistics (OS)**

**#3**

## **Official Statistics – Legislation Framework**



Sekolah Tinggi Ilmu  
Statistik (Official)



@stis\_jkt



@polstatstis



[www.stis.ac.id](http://www.stis.ac.id)

Kerangka Hukum Official Statistics

Hubungan antara Peraturan Perundang-undangan Official Statistics dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Model dan Substansi Undang-undang Official Statistik

UU Statistik Nomor 16 Tahun 1997

Sertifikasi dan Branding Official Statistics

Isi Materi Kuliah: **Official Statistics – Legislation Framework**

# **Kerangka Hukum Official Statistics**

# Pendahuluan

**“official statistics are currently defined** as statistics developed, produced and disseminated by the national statistical systems of countries in *conformity with the United Nations Fundamental Principles of Official Statistics, internationally agreed statistical standards, codes* and recommendations as well as applicable **national legislation and programmes.**”

*International statistical principles* and *good practices* **must be implemented and followed** within each national statistical system (NSS) using **national legal frameworks and guidelines.**

Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)

# Pendahuluan

*The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

- Legislasi nasional dibangun dengan baik dengan tujuan untuk mengatur produksi Official Statistics dan memastikan Prinsip-Prinsip Dasar Official Statistics PBB.
- Tujuan khususnya adalah memastikan produksi Official Statistics memenuhi kualitas yang baik, memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat dipercaya oleh pengguna serta pemangku kepentingan lainnya.
- Struktur dan tradisi hukum bervariasi antar negara, kerangka/landasan hukum untuk produksi Official Statistics harus disesuaikan menurut konteks nasional.
- Tata Kelola Sistem Statistik Nasional (SSN) yang baik memiliki landasan hukum statistik yang fleksibel guna menanggapi perubahan kondisi dan keadaan tanpa perlu sering mengubah undang-undang utamanya.
- Landasan hukum yang fleksibel dapat meminimalkan perubahan undang-undang dan risiko terkait campur tangan politik terhadap undang-undang tersebut.

# Kerangka Legislatif Statistik

*The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

- Salah satu karakteristik kerangka legislatif yang fleksibel adalah membangun dan menerapkan definisi, metodologi, dan standar Official Statistics tanpa perlu mengubah undang-undang ketika dilakukan amandemen.
- Direkomendasikan bahwa akan lebih baik jika tidak mencantumkan daftar lengkap seluruh instansi penghasil atau produsen Official Statistics pada Sistem Statistik Nasional kedalam undang-undang statistik, melainkan hanya mencantumkan aturan dan prosedur dalam mengidentifikasi dan menentukan kriteria produk Official Statistics yang harus menjadi bagian dari program statistik nasional.
- Demikian pula, disarankan untuk menggambarkan domain statistik dan keluaran NSO/NSS secara umum daripada mendaftarkan satu per satu dalam undang-undang agar terjaga fleksibilitasnya, bilamana terdapat pengembangan statistik baru.

# LEGAL INSTRUMENT S

## The national law on official statistics:

A

Sistem hukum perstatistikan yang utama adalah undang-undang tentang Official Statistics. Undang-undang tersebut pada prinsipnya harus menerjemahkan **UNFPOS** ke dalam kerangka hukum dan peraturan nasional lainnya. Disarankan untuk membuat undang-undang statistik secara umum dengan ketentuan atau penjelasan lanjutan yang lebih rinci pada peraturan lain atau turunannya (misalnya peraturan, perintah dan keputusan-keputusan). Undang-undang statistik disusun melalui proses yang melibatkan para pemangku kepentingan lain dan disahkan oleh dewan pembuat undang-undang (misalnya Parlemen).

## Regulations, orders and decrees:

B

Pelaksanaan undang-undang tentang Official Statistics dapat dilakukan melalui peraturan, perintah dan keputusan. Keputusan-keputusan tersebut lebih mengatur tentang beberapa masalah secara lebih rinci atau mencakup item-item yang bersifat sementara atau berubah-ubah. Sepertihalnya, komposisi, struktur dan isi dari program statistik dalam SSN dan ketentuan pengorganisasiannya. Kekuatan keputusan dapat didelegasikan kepada Presiden, Perdana Menteri, Menteri atau Kepala SSN/Kepala ahli statistik/*chief statistician*.


## Guidelines and handbooks:

C

Pedoman dan buku pegangan non-formal dapat menjelaskan secara lebih rinci masalah teknis atau metodologis untuk diterapkan di seluruh SSN. Pedoman dan buku pegangan tersebut, disahkan oleh kepala ahli statistik/*chief statistician*, instrument ini seringkali tidak memiliki status hukum namun dapat lebih sering diperbaharui.

# **Hubungan antara Peraturan Perundang-undangan Official Statistics dengan Peraturan Perundang- undangan Lain**





*“The legislation in the field of official statistics may have cross-linkages with the other legislation not directly related to statistics. Other legislation might conflict with the statistical legislation, with the risk of hindering the coordination and functioning of the NSS. Thus, when revising or updating the statistical legislation, these cross-linkages must be carefully taken care of.”*

**Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)**

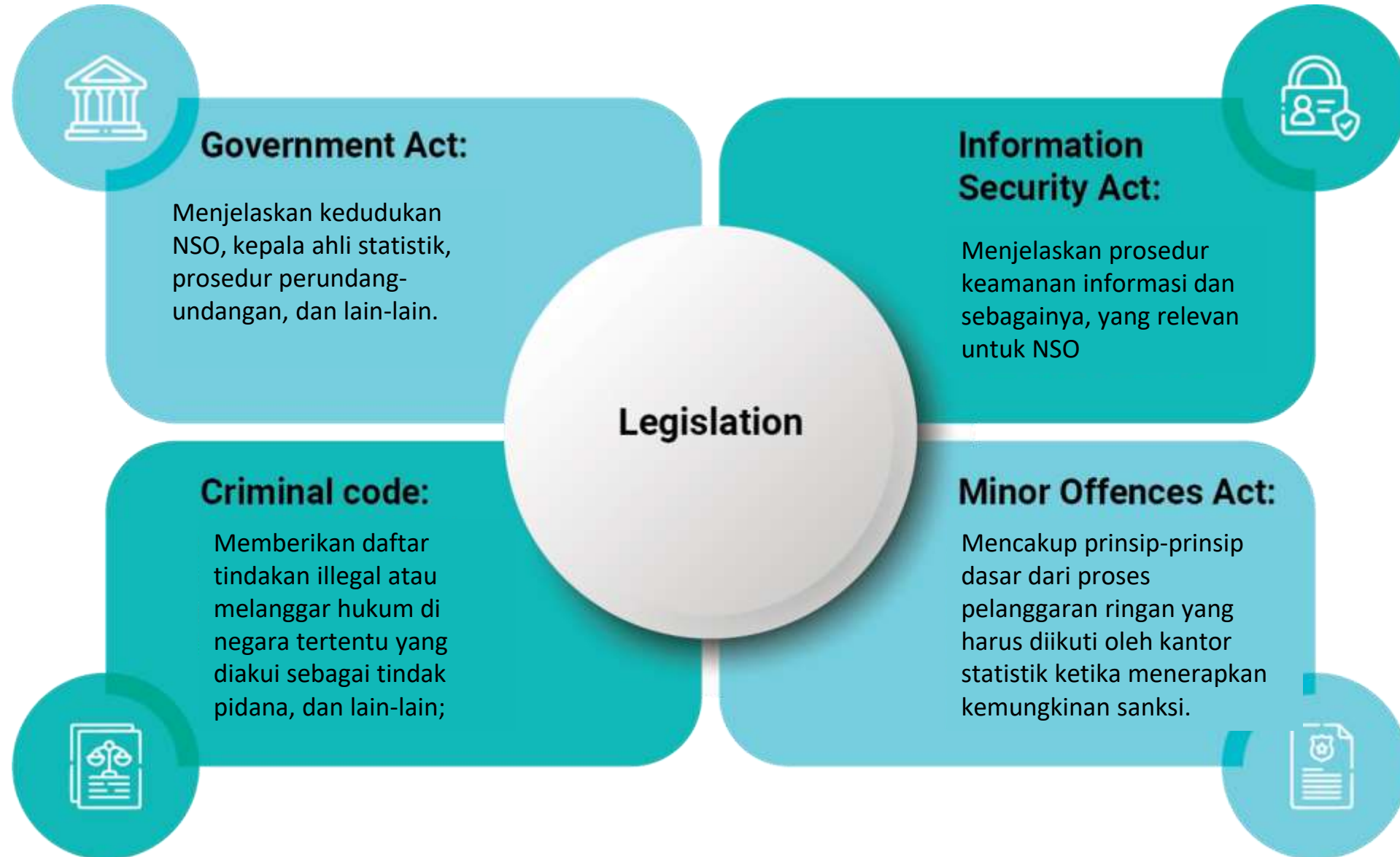
---

# Pendahuluan

*The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

- Peraturan perundang-undangan official statistics dapat memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang tidak berkaitan langsung dengan statistik. Peraturan perundang-undangan lain mungkin saja tidak bersesuaian dengan undang-undang statistik, sehingga dapat menimbulkan risiko yaitu menghambat koordinasi dan fungsi SSN. Olehnya, direkomendasikan bahwa ketika melakukan revisi atau memperbaharui undang-undang statistik, keterkaitan silang ini harus diperhatikan dengan cermat.
- Pada panduan tentang modernisasi undang-undang statistik (UNECE, 2018) merekomendasikan bahwa undang-undang statistik sangat memprioritaskan perlindungan terhadap UNFPOS, khususnya untuk menghindari setiap pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dan independensi profesional pada Lembaga/ otoritas statistik.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan perundang-undangan lainnya



Instrument hukum yang berkaitan erat dengan undang-undang statistik

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

Selanjutnya, undang-undang statistik dapat berdampak pada tindakan hukum berikut:

## **Public Servants Act** □

Undang-undang pegawai negeri dapat berisiko bertentangan dengan prosedur pengangkatan dan mandat staf statistik. Untuk memenuhi prinsip independensi profesional produksi statistik, prosedur pengangkatan, mandat, dan alasan pemberhentian kepala kantor statistik harus ditetapkan dalam undang-undang statistik, untuk menghindari kecurigaan campur tangan politik.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

Selanjutnya, undang-undang statistik dapat berdampak pada tindakan hukum berikut:

## **Public Finance Act** □

Ketentuan anggaran pada undang-undang keuangan publik dapat mempengaruhi proses alokasi anggaran ke NSO dan sistem statistik. Oleh karena itu, NSO dan mitra lainnya (kementerian keuangan dan otoritas official statistic lainnya) harus terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

**Tindakan di bidang administrasi dan lainnya □ Contohnya adalah Registrasi, Big Data, dan basis data pribadi.**

## ➤ **Case 1:**

Peraturan perundang-undangan statistik biasanya harus memberikan mandat yang jelas untuk akses ke data dari semua sumber data administratif dan registrasi yang ada terutama yang dipegang oleh otoritas publik dan pemegang data pribadi.

Namun, adakalanya kasus di mana undang-undang mengenai perlindungan data individu dalam sumber administratif tidak mengizinkan transmisi data tersebut, sekalipun kepada produsen official statistics, bahkan jika undang-undang statistik memberikan dasar hukum untuk transmisi tersebut. Dalam hal ini, pilihannya adalah memperkuat ketentuan undang-undang statistik yang memungkinkan produsen official statistics mengakses data administratif di tingkat mikro dan memastikan kapan undang-undang yang mengatur sumber data disesuaikan untuk mengizinkan akses data secara eksplisit untuk tujuan dan kepentingan statistik.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

Tindakan di bidang administrasi dan lainnya □ Contohnya adalah Registrasi, Big Data, dan basis data pribadi.

## ➤ Case 2:

Masalah yang sama mungkin muncul terkait akses ke data bisnis dan basis data pihak swasta lainnya yang berisi data pribadi. Di masa depan, untuk dapat menggunakan data dari sumber – sumber tersebut, perubahan dalam undang-undang yang relevan dan perjanjian yang dibutuhkan tentang penggunaan dan penetapan harga yang sesuai sangat diperlukan.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

## Electronic Communication Act□

undang-undang komunikasi elektronik dapat mencakup larangan eksplisit untuk mengizinkan akses ke data komunikasi elektronik untuk statistik atau tujuan lainnya, kecuali untuk tujuan yang ditentukan dengan jelas seperti keamanan nasional dan pertahanan keamanan publik.



# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

## Privacy and Data Protection Act □

- Ketentuan privasi dan perlindungan data mengatur perlindungan individu yang berhubungan dengan pemrosesan dan pembagian data pribadi.
- Official statistics sering diberikan pengecualian dari hak seseorang untuk meninjau, memperbaiki, atau menghapus data mereka karena data yang dimiliki otoritas statistik tidak digunakan untuk membuat keputusan apa pun tentang individu. Pengecualian ini juga harus menjadi bagian dari undang-undang statistik.
- Perlindungan penuh atas data individu yang diperoleh secara eksklusif untuk produksi statistik harus diberikan dalam sistem statistik serta dipastikan dalam undang-undang statistik. Data tersebut tidak boleh digunakan untuk penyelidikan, pengawasan, proses hukum, pengambilan keputusan administratif, atau penanganan serupa lainnya atas hal – hal yang berkaitan dengan individu atau badan hukum oleh otoritas atau organisasi internasional mana pun

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

## Archiving Act □

- Undang-undang pengarsipan mengatur prosedur dan pengarsipan data untuk kepentingan nasional.
- Undang-undang tersebut berlaku ketika data statistik menjadi bagian dari arsip publik dan memberikan kewajiban untuk pengarsipan elektronik.
- Bisa dimungkinkan ada beberapa peraturan yang bertentangan antara undang-undang statistik dan pengarsipan, misalnya tentang kepentingan nasional, siapa yang dapat menjadi arsiparis data, dan bagaimana data harus diarsipkan, termasuk lingkungan teknologi.
- Perbedaan tersebut perlu ditinjau ketika merevisi salah satu undang-undang.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

## **Public Information Access / Freedom of Information Act** □

- Undang-undang akses informasi publik mengatur prosedur yang menjamin setiap orang bebas mengakses dan berhak untuk menggunakan kembali informasi publik yang dimiliki oleh lembaga lembaga publik (contoh: lembaga-lembaga negara dan pemerintahan daerah).
- Sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang statistik, data rahasia harus dikecualikan dari aturan umum mengenai fasilitas bebas akses ke data, terutama yang dipegang oleh Lembaga-lembaga pemerintah.
- Undang-undang akses informasi publik harus mendefinisikan data statistik rahasia yang dirujuk dalam undang-undang statistik untuk menghindari undang-undang yang saling bertentangan. Akses untuk tujuan statistik ini harus diperlakukan sebagai pengecualian dalam undang-undang akses informasi publik.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

## Undang-undang sensus yang berkaitan dengan undang-undang statistik □

- Persiapan dan pelaksanaan sensus, terlepas dari metodologi, memerlukan dasar hukum baik itu peraturan umum undang-undang statistik, pasal khusus dalam undang-undang statistik, ataupun tindakan khusus untuk pelaksanaan sensus.
- Jika terdapat undang-undang seperti itu, hubungan antara undang-undang nasional tentang official statistics dan sensus tertentu harus diselaraskan untuk memastikan konsistensi terkait dengan mandat, penanganan kerahasiaan, penyebaran, dan lain-lain.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

*Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

Pedoman modernisasi perundang-undangan statistik membahas beberapa aspek hukum terkait sensus, disebutkan bahwa undang-undang tersebut biasanya mengatur hal – hal berikut yang berkaitan dengan sensus □

Pedoman **modernisasi**  
**perundang-undangan statistik**  
membahas beberapa aspek  
hukum terkait sensus yang  
mengatur hal-hal berikut:

Cakupan umum

Dana yang dialokasikan untuk keseluruhan operasional sensus

Periode waktu Sensus

Pembagian kerja, tanggung jawab, dan hak organisasi yang berpartisipasi

Kewajiban warga negara memberikan informasi sensus yang lengkap dan akurat, dan pencacah mencatat jawaban dengan jujur, serta sanksi dan hukuman jika tidak memenuhi

Akses, pemanfaatan, dan keterkaitan registrasi untuk menghasilkan data sensus atau mendukung operasi lapangan

Kerahasiaan informasi individu yang dikumpulkan dalam pelaksanaan sensus, dan sanksi atas pelanggaran kerahasiaan.

# Keterhubungan Undang-undang Statistik dengan Perundang-undangan Lainnya

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

## Undang-undang yang mengatur aktivitas produksi official statistics lainnya □

- Undang-undang dan aturan yang mengatur aktivitas produsen official statistics lainnya di Kementerian/Lembaga dan otoritas publik lainnya seperti bank sentral, mungkin tidak sejalan dengan UNFPOS.
- Statistik makroekonomi, keuangan, dan moneter yang dihasilkan dalam bank sentral merupakan official statistics, dengan demikian, diusulkan bahwa entitas bank sentral yang menghasilkan official statistics harus diakui sebagai otoritas statistik dan dianggap sebagai bagian dari NSS.
- Perlunya kolaborasi antara NSO dan bank sentral, termasuk masalah legislative. Hal ini juga menekankan bahwa undang-undang statistik nasional harus berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan official statistics dan dilakukan oleh setiap produsen official statistics.

# **Model dan Substansi Undang-undang Official Statistik**



# **General Model** Undang-undang Official Statistics

The main  
headings of  
a statistical  
law

Tujuan dan ruang lingkup undang-undang

Prinsip-prinsip utama dan definisi official statistics

Tata Kelola Sistem Statistik Nasional

Dewan Penasihat Statistik dan Badan Penasihat Lainnya

Koordinasi Sistem Statistik Nasional dan Program Statistik

Pengumpulan data

Kerahasiaan statistik

Kualitas official statistics

Diseminasi dan Komunikasi

Layanan Statistik

Kerjasama Internasional

Pelanggaran

Hubungan dengan peraturan perundang-undangan

# General Model Undang-undang Official Statistics

Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)

## Substansi Utama yang Dicakup dalam Undang-undang Statistik :

1. **Definisi** official statistics, untuk dibedakan dari informasi administratif dan sesuai dengan UNFPOS;
2. **Definisi konsep-konsep utama** yang digunakan dalam undang-undang dan yang diperlukan untuk interpretasi hukum seperti survei statistik, data administratif, unit statistik, data individu, dan lain-lain;
3. Kriteria untuk mengidentifikasi **Sistem Statistik Nasional**, yang notabene adalah produsen official statistics;
4. Tugas-tugas **NSO dan kepala ahli statistik**, terutama yang berkaitan dengan koordinasi dan perencanaan;
5. Proses untuk mengembangkan **program antar tahun dan tahunan**, konsultasi pengguna program, keterlibatan dewan penasihat statistik, proses pengambilan keputusan, dan lain-lain;

# General Model Undang-undang Official Statistics

Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)

## Substansi Utama yang Dicakup dalam Undang-undang Statistik :

5. Mandat **pengumpulan data** untuk memastikan akses ke data administratif dan sumber data lainnya;
6. Prinsip dan prosedur untuk menangani **data statistik rahasia**, mengamankan penggunaan eksklusif untuk statistik;
7. Kriteria dan mekanisme/prosedur untuk memastikan **kualitas yang tinggi**;
8. Prinsip **diseminasi** yang menjamin akses yang sama terhadap pengguna dan diseminasi yang user-friendly.

# **UU Statistik Nomor 16 Tahun 1997**

# Materi yang termuat pada UU Nomor 16 Tahun 1997

*Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

## **Mahasiswa diberikan tugas Presentasi dan diskusi mengenai:**

1. UU Nomor 16 Tahun 1997
2. PP 51 Tahun 1999
3. Peraturan/Keputusan Kepala BPS No 5 Tahun 2000 tentang SSN
4. Peraturan/Keputusan Kepala BPS No 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
5. Peraturan/Keputusan Kepala BPS No 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
6. Peraturan/Keputusan Kepala BPS No 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Khusus

# Materi yang termuat pada UU Nomor 16 Tahun 1997

*Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

# Materi yang termuat pada UU Nomor 16 Tahun 1997

Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)

A	Rincian Pasal Menurut Kategori		
	Kategori	UU No.16/1997	PP No.51/1999
1	Pemberlakuan Dasar Hukum	19 Mei 1997	26 Mei 1999
2	Koordinasi Sistem Statistik Nasional	Bab IV Ps 17 (utama); Ps 18; Ps 30 (3); Ps 31	Ps 48; Ps 49; Ps 50; Ps 51; Ps 52; Ps 58 (2); Ps 61 (d); Ps 62 (f); Ps 63 (d); Ps 64 (C.); Ps 65 (d); Ps 67 (c.); Ps 66 (d)
3	Peran Kepala Statistik Nasional atau Kepala BPS	<i>explicitely blm ditemukan</i>	Ps 7; Ps 10; Ps 14; Ps 18 (3); Ps 22 (2); Ps 26 (4); Ps 36 (5); Ps 54 (1)
4	Kerahasiaan Data Individu	Ps 21 & Ps 24	Ps 17;
5	Data Administrasi (Aksesibilitas)	Ps 10 & implisit pada Ps 20	Ps 11; Ps 12; Ps 27; Ps 28 (1); Ps 38
6	Diseminasi	Ps 15; Ps 16	Ps 42; Ps 43; Ps 44; Ps 45; Ps 46; Ps 60 (f);
7	Data Mikro untuk Penelitian (Sharing)	<i>explicitely blm ditemukan (may be implisit Ps 6-stat dasar n stat sektoral utk umum; Ps 20-statistik)</i>	<i>explicitely blm ditemukan</i>

# Materi yang termuat pada UU Nomor 16 Tahun 1997

Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)

B	Rincian Mandat Menurut Kategori		
	Kategori	UU No.16/1997	PP No.51/1999
2	Koordinasi Sistem Statistik Nasional	Penyelenggaraan Statistik dan Pembinaan	Utamanya mengenai Penyelenggaraan Statistik dan Pembinaan Statistik
3	Peran Kepala Statistik Nasional atau Kepala BPS	Tidak ditemukan	Wilayah Pencacahan, Petugas sensus & survei; Jaminan Asuransi Petugas Sensus; Perwakilan BPS di daerah; Penyelenggaraan Survei; Penyelenggaraan stat sektoral
4	Kerahasiaan Data Individu	Seluruh Produsen Statistik dan Petugas statistik	Petugas Sensus
5	Data Administrasi (Aksesibilitas)	Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus	Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus
6	Diseminasi	BRS	Pengumuman, Penyebarluasan, Pemanfaatan, dan Pemasyarakatan Hasil Statistik
7	Data Mikro untuk Penelitian (Sharing)	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan



# **Sertifikasi dan Branding Official Statistics**

# Sertifikasi

Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)

## ❑ Latar belakang:

- Semua statistik yang dihasilkan oleh otoritas nasional mungkin tidak sesuai dengan UNFPOS maupun memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah official statistics.
- “unofficial” statistics merupakan statistics yang diproduksi di luar undang – undang statistik dan dalam banyak kasus, dipublikasikan oleh otoritas yang berwenang yang bukan produsen dari official statistics.
- Dalam beberapa kasus, statistik yang dipublikasikan oleh produsen official statistics mungkin tidak sepenuhnya memenuhi UNFPOS.

❑ **Oleh karena itu**, ada baiknya untuk menerapkan mekanisme yang membedakan antara statistik yang dianggap resmi (*official*) dengan yang tidak (*unofficial*), terlepas dari apakah statistik itu berasal dari produsen official statistics.

# Sertifikasi

*Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*

- ❑ Mekanisme Sertifikasi perlu didasarkan pada kriteria dan prinsip yang jelas, berdasarkan undang – undang nasional tentang official statistics dan/atau kriteria lain yang transparan dan sejalan dengan prinsip – prinsip internasional yang tersedia.
- ❑ Program kerja multitahunan dan tahunan untuk official statistics umumnya akan berfungsi sebagai dasar untuk sertifikasi produsen dan produk yang dianggap sebagai official statistics.

# Sertifikasi: Best practice dari Statistik Lituania

Source: *The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)*



- ❑ Kegiatan statistik di Lituania dipandu oleh peraturan khusus yang disetujui oleh Pemerintah Republik Lituania
- ❑ Sejalan dengan tanggung jawabnya, statistik di Lituania menerapkan kriteria berikut, yang dievaluasi sebelum ditetapkan statusnya sebagai produsen official statistics dan sebelum dimasukkan ke dalam program kerja official statistics:
  1. Lembaga tersebut harus merupakan otoritas publik;
  2. Lembaga tersebut harus secara formal diberi tanggung jawab untuk menghasilkan statistik khusus di tingkat nasional;
  3. Tanggung jawab untuk menghasilkan statistik khusus juga harus ditetapkan dalam undang – undang;
  4. Lembaga memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan statistik khusus, misalnya yang disyaratkan oleh undang – undang yang berlaku pada Uni Eropa;
  5. Lembaga memiliki kemampuan dan komitmen untuk mematuhi Kode Praktik Statistik Eropa;

# Sertifikasi: Best practice dari Statistik Lituania

Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)



- ❑ Statistik Lituania menandatangani perjanjian bilateral dengan produsen official statistics lainnya, dan memastikan kesadaran dan pelaksanaan Kode Praktik Statistik Eropa.
- ❑ Perjanjian tersebut mencakup komitmen oleh produsen official statistics untuk:
  1. Mematuhi prinsip – prinsip Kode Praktik Statistik Eropa dan menetapkan langkah-langkah untuk penerapannya;
  2. Memberikan informasi kepada Statistik Lituania untuk program kerja official statistics dan melaporkan pelaksanaannya;
  3. Menyelaraskan kuesioner pengumpulan data statistik dengan Statistik Lituania;
  4. Menyelaraskan metodologi statistik dengan Statistik Lituania;
  5. Memantau dan menilai petugas survei serta biaya lain yang diperlukan sehubungan dengan pengumpulan data statistik dan penerapan langkah-langkah pengurangannya;
  6. Memastikan kerahasiaan data statistik yang dikumpulkan untuk tujuan official statistics;
  7. Memastikan aksesibilitas indikator statistik dan metadata pada portal official statistics;
  8. Memberikan data statistik kepada Eurostat sesuai dengan jadwal yang disepakati;
  9. Bekerja sama dengan Statistik Lituania dalam pengembangan official statistics.

# Branding Official Statistics

Source: The 4<sup>th</sup> UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems (2021)

- ❑ Konsep '*branding official statistics*' tidak terlalu sering digunakan. Dalam kebanyakan kasus, lebih berfokus kepada memastikan official statistics yang berkualitas tinggi.
- ❑ Perlu dicatat bahwa persepsi NSO dan produsen official statistics lainnya sebagai organisasi independen dan profesional merupakan aspek penting dalam memberikan citra positif official statistics yang berkualitas tinggi.
- ❑ Contoh berikut menunjukkan kemungkinan untuk merancang beberapa statistik menjadi *official* (resmi) dengan menggunakan logo tertentu, terutama berdasarkan prosedur formal.



The UK Statistics Authority



SCB Sweden



Official Statistics Authority  
France



Irish Statistical System  
Code of Practice

Terimakasih

